



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-25119/P.01/DL.02.01/12/2023 Jakarta, 22 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Seleksi Program Beasiswa Pusbindiklatren
Bappenas Tahun 2024 Tahap 2

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Kementerian/Lembaga;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian/Lembaga;
3. Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah/Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten
(Daftar terlampir)

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga/daerah, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan serta pendukung perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2024. Program beasiswa yang ditawarkan pada tahun 2024 tahap 2 meliputi program *Linkage* dalam program **Development of Exhaustive Human Resource** (DXHR).

Proses seleksi Program Beasiswa Tahap 2 meliputi tahapan administrasi, tes potensi akademik (TPA), *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) ITP, dan seleksi wawancara khusus untuk program tertentu (diinformasikan lebih lanjut).

Calon peserta Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2024 Tahap 2 diharuskan mendaftar melalui situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>. **paling lambat tanggal 20 Januari 2024** (*paperless*). Seluruh dokumen pendukung **WAJIB** diunggah dan dilengkapi dalam Simdiklat Pendaftaran untuk proses verifikasi lebih lanjut. Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) serta E-Meterai dapat digunakan dalam proses pendaftaran Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2024.

Dokumen pendaftaran *hardcopy* **WAJIB dikirimkan bagi** peserta yang lolos hingga tahap seleksi TOEFL, baik dikirimkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman ke: Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Program Pendidikan Tahun 2024), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320. (akan diinformasikan lebih lanjut dalam surat resmi)

Bagi **peserta yang telah mendaftar Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2024 Tahap 1** dan berminat dengan program *Linkage* dalam program DXHR, peserta yang bersangkutan diharuskan **menggunggah surat usulan penambahan pilihan program** dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD/BKPSDM atau Kepala Pusat

Pendidikan dan Pelatihan setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung dalam sistem pendaftaran.

Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi untuk diunggah dalam Simdiklat pendaftaran maupun proses pengiriman adalah sebagai berikut:

1. Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD/BKPSDM atau Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2;
2. Hasil cetak formulir registrasi *online* atau formulir pendaftaran manual yang telah diisi lengkap, bermeterai, bertanda tangan asli calon peserta dan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD/ BKPSDM atau Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta stempel cap basah pada posisi tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/ BKD/BKPSDM atau Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
3. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
4. Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
5. Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD/BKPSDM atau Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi (formulir terlampir); serta
6. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan.

Selain itu, apabila dalam kegiatan Seleksi Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2024 terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik oleh pegawai Pusbindiklatren, Saudara dapat melaporkan tindakan tersebut ke surel **pusbindiklatren@bappenas.go.id** atau Inspektorat Kementerian PPN/Bappenas dengan dilengkapi bukti otentik (identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya).

Panduan Pelaksanaan Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2024 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas

Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan

Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320

Telepon: 021 31928280, 31928285

Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id

Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perkenan Saudara dalam mendukung terlaksananya kegiatan tersebut, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana,



Wignyo Adiyoso

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Utama Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;
4. Peringgal.

Lampiran Surat
Nomor : B-25119/P.01/DL.02.01/12/2023
Tanggal : 22 Desember 2023

DAFTAR UNDANGAN

I. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Informasi Geospasial (BIG)
3. Badan Intelijen Negara (BIN)
4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
5. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
6. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
7. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
11. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
13. Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI)
14. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
15. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
16. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
18. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
19. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
20. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
21. Badan Pusat Statistik (BPS)
22. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
23. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
24. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
25. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
26. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
28. Kejaksaan Agung
29. Kementerian Agama
30. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
31. Kementerian Badan Usaha Milik Negara

32. Kementerian Dalam Negeri
33. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
34. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
35. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
36. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
37. Kementerian Kelautan dan Perikanan
38. Kementerian Kesehatan
39. Kementerian Ketenagakerjaan
40. Kementerian Keuangan
41. Kementerian Komunikasi dan Informatika
42. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
45. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
46. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
47. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
48. Kementerian Luar Negeri
49. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
50. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
51. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52. Kementerian Pemuda dan Olah Raga
53. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
54. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
55. Kementerian Perdagangan
56. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
57. Kementerian Perhubungan
58. Kementerian Perindustrian
59. Kementerian Pertahanan
60. Kementerian Pertanian
61. Kementerian Sekretariat Negara
62. Kementerian Sosial
63. Kepolisian Negara Republik Indonesia
64. Komisi Aparatur Sipil Negara
65. Komisi Pemberantasan Korupsi
66. Komisi Pemilihan Umum

67. Komisi Yudisial
68. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI)
69. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI)
70. Mahkamah Agung
71. Mahkamah Konstitusi
72. Ombudsman Republik Indonesia
73. Otoritas Ibukota Negara
74. Perpustakaan Nasional
75. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
76. Sekretariat Kabinet
77. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
78. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
79. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)
80. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

II. SETDA/BADAN KEPEGAWAIAN/BKPSDM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

1. Provinsi Aceh

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya
- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara

- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhanbatu
- 2.8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhanbatu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunungsitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidempuan
- 2.30. Kota Pematangsiantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjungbalai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

3. Provinsi Sumatera Barat

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman
- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang

- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

4. Provinsi Riau

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Singingi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

5. Provinsi Kepulauan Riau

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

6. Provinsi Jambi

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

7. Provinsi Bengkulu

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Bengkulu Kaur
- 7.5. Kabupaten Bengkulu Kapahiang
- 7.6. Kabupaten Bengkulu Lebong
- 7.7. Kabupaten Bengkulu Mukomuko

- 7.8. Kabupaten Bengkulu Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Bengkulu Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

8. Provinsi Sumatera Selatan

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuklinggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Kota Prabumulih

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

10. Provinsi Lampung

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu
- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro

11. Provinsi Banten

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Jawa Barat

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor
- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Kerawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

14. Provinsi Jawa Tengah

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemalang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang
- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang

- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunung Kidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

17. Provinsi Bali

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya

- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

20. Provinsi Kalimantan Barat

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Pontianak
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang
- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau

- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangka Raya

23. Provinsi Kalimantan Timur

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Panajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan
- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

25. Provinsi Gorontalo

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

26. Provinsi Sulawesi Selatan

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng

- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara
- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Baubau
- 27.17. Kota Kendari

28. Provinsi Sulawesi Tengah

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Muntong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Toli-Toli
- 28.13. Kota Palu

29. Provinsi Sulawesi Utara

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

30. Provinsi Sulawesi Barat

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Minahasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

31. Provinsi Maluku

- 31.1. Kabupaten Baru
- 31.2. Kabupaten Baru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru
- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.6. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.7. Kabupaten Taliabu
- 32.8. Kota Ternate
- 32.9. Kota Tidore Kepulauan

33. Provinsi Papua

- 33.1. Kabupaten Biak Nunfor
- 33.2. Kabupaten Jayapura
- 33.3. Kabupaten Keerom
- 33.4. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.5. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.6. Kabupaten Sarmi

- 33.7. Kabupaten Supiori
- 33.8. Kabupaten Waropen
- 33.9. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat Daya

- 34.1. Kabupaten Mamberamo
- 34.2. Kabupaten Raja Ampat
- 34.3. Kabupaten Sorong
- 34.4. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.5. Kabupaten Tambrauw
- 34.6. Kota Sorong

35. Provinsi Papua Barat

- 35.1. Kabupaten Fakfak
- 35.2. Kabupaten Kaimana
- 35.3. Kabupaten Manokwari
- 35.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 35.5. Kabupaten Maybrat
- 35.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 35.7. Kabupaten Teluk Bintuni
- 35.8. Kabupaten Teluk Wondama

36. Provinsi Papua Selatan

- 36.1.1. Kabupaten Merauke
- 36.1.2. Kabupaten Boven Digoel
- 36.1.3. Kabupaten Mappi
- 36.1.4. Kabupaten Asmat

37. Provinsi Papua Tengah

- 37.1.1. Kabupaten Nabire
- 37.1.2. Kabupaten Puncak Jaya
- 37.1.3. Kabupaten Paniai
- 37.1.4. Kabupaten Mimika
- 37.1.5. Kabupaten Puncak
- 37.1.6. Kabupaten Dogiyai
- 37.1.7. Kabupaten Intan Jaya
- 37.1.8. Kabupaten Deiyai

38. Provinsi Papua Pegunungan

- 38.1.1. Kabupaten Jayawijaya
- 38.1.2. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 38.1.3. Kabupaten Yahukimo
- 38.1.4. Kabupaten Tolikara
- 38.1.5. Kabupaten Mamberamo Tengah
- 38.1.6. Kabupaten Yalimo
- 38.1.7. Kabupaten Lanny Jaya
- 38.1.8. Kabupaten Nduga

PROGRAM BEASISWA

1. Informasi Program Beasiswa Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Beasiswa Program Pendidikan Pusbindiklatren Bappenas tahun 2024, Pusbindiklatren Bappenas menawarkan program beasiswa untuk

Program S2 *Linkage* Jepang dalam program Development of Exhaustive Human Resource (DXHR) yang akan diselenggarakan di program studi universitas dalam negeri di Indonesia yang bekerja sama dengan universitas di Jepang. Pendanaan program DXHR merupakan pembiayaan bersama antara Pusbindiklatren Bappenas (untuk tahun pertama di Indonesia dan pelatihan bahasa) dan Japan International Cooperation Agency/JICA (untuk tahun kedua di Jepang).

Peserta dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) tahun di salah satu universitas di Indonesia dan 1 (satu) tahun berikutnya di Jepang dengan mendapat 2 (dua) gelar, dengan ketentuan sebagai berikut.

- Pusbindiklatren memberikan beasiswa persiapan Bahasa Inggris di Pusat Bahasa yang ditunjuk oleh Pusbindiklatren selama kurang lebih 5,5 bulan untuk mencapai nilai IELTS minimal 6,5. Pelaksanaan persiapan bahasa Inggris akan dilaksanakan sebelum proses perkuliahan di Indonesia
- Apabila peserta tidak dapat mencapai nilai IELTS minimal 6,5, yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai TOEFL selama mengikuti tahun pertama program *S2 Linkage* Jepang di Indonesia
- Pusbindiklatren memberikan beasiswa persiapan Bahasa Jepang (*Basic Japanese Language Training*) di pusat bahasa yang ditunjuk oleh Pusbindiklatren selama kurang lebih 1,5 bulan. Pelaksanaan persiapan bahasa Jepang akan dilaksanakan sebelum proses keberangkatan ke Jepang
- Apabila tidak lulus seleksi ke luar negeri, maka yang bersangkutan akan meneruskan perkuliahan di dalam negeri, dan untuk itu hanya memperoleh 1 (satu) gelar dari universitas di dalam negeri

DXHR diselenggarakan di lima program studi, yakni:

- Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro-Universitas Jepang
- Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada-Universitas Jepang
- Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada-Universitas Jepang
- Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya-Universitas Jepang
- Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan, Universitas Brawijaya-Universitas Jepang

Informasi lebih lanjut perihal penyelenggaraan program S2 *Linkage DXHR* dapat dilihat melalui tabel berikut

TOPIK STUDI	UNIVERSITAS DI INDONESIA	UNIVERSITAS DI JEPANG
Land and Economic Resilience	<ul style="list-style-type: none"> a. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada b. Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan, Universitas Brawijaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. National Graduate Institute for Policy Studies/GRIPS b. Graduate School of Science and Engineering, Ritsumeikan University
Maritime and International Cooperation	<ul style="list-style-type: none"> a. Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. National Graduate Institute for Policy Studies/GRIPS b. Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pasific University
Digitalization and Innovation	<ul style="list-style-type: none"> a. Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada b. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro 	<ul style="list-style-type: none"> a. Graduate School of Innovation and Practice for Smart Society, Hiroshima University b. Graduate School of Innovation and Practice for Smart Society, International University of Japan

2. Persyaratan Program Beasiswa

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, dengan ini kami informasikan bahwa untuk Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2023 akan mengacu kepada persyaratan yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenpan RB tersebut dan atau disesuaikan dengan persyaratan dari masing-masing instansi untuk penetapan tugas belajar, yakni:

NO	PERSYARATAN	S2 LINKAGE DXHR
1	Pengusulan Dari Instansi	Minimal Eselon II Bagian Kepegawaian (BKD dan/atau Biro Kepegawaian/SDM)
2	Unit Kerja	unit perencanaan di kementerian/lembaga/daerah, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan serta pendukung perencanaan pembangunan
3	PNS 100% Minimal Golongan III/a	1 Tahun
4	Strata Pendidikan Minimal	S1/D4 (program tertentu)
5	Minimal Tahun Lulus D4/S1	2 Tahun
6	Umur Maksimal*	37 Tahun
7	IPK Minimal	2,75
8	TPA Kategori Pusat	565
9	TPA Kategori Pusat Luar Jawa	525
10	TPA Kategori Pemda Jawa	525
11	TPA Kategori Pemda Luar Jawa	500
12	TOEFL Minimal	500

Keterangan :

*Hanya pada beberapa program studi menerima peserta dengan latar belakang pendidikan D4.

**Tanggal lahir maksimal yang dapat diterima ialah 1 September 1986 atau batas maksimal usia pendaftar ialah 37 tahun pada bulan Agustus 2024

Selain itu, pada penyelenggaraan beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2024, Pusbindiklatren Bappenas akan mengkomodir peserta penyandang disabilitas, **khususnya penyandang disabilitas fisik pada anggota gerak**, bukan disabilitas sensorik atau intelektual dan mental.

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021, kami informasikan juga bahwa untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar (daftar daerah terlampir), usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:

- Program Strata II (S-2) atau setara (baik S2 Dalam Negeri maupun S2 *Linkage*), berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun*;

- Program Strata III (S-3) atau setara (baik S3 Dalam Negeri), berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, berikut ini daftar daerah tertinggal yang berjumlah 62 Kabupaten.

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	Sumatera Utara	Nias Barat	-
2	Sumatera Utara	Nias Utara	-
3	Sumatera Utara	Nias	-
4	Sumatera Utara	Nias Selatan	-
5	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	-
6	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	DOB
7	Lampung	Pesisir Barat	DOB
8	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	-
9	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	-
10	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	-
11	Nusa Tenggara Timur	Kupang	-
12	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	-
13	Nusa Tenggara Timur	Belu	-
14	Nusa Tenggara Timur	Alor	-
15	Nusa Tenggara Timur	Lembata	-
16	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	-
17	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	-
18	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	-
19	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	-
20	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	-
21	Nusa Tenggara Timur	Malaka	DOB
22	Sulawesi Tengah	Donggala	-
23	Sulawesi Tengah	Tojo Una Una	-
24	Sulawesi Tengah	Sigi	-
25	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	-
26	Maluku	Kab. Seram Bagian Barat	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
27	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	-
28	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	-
29	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	-
30	Maluku	Kab. Buru Selatan	-
31	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	-
32	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	DOB
33	Papua	Keerom	-
34	Papua	Pegunungan Bintang	-
35	Papua	Memberamo Tengah	-
36	Papua	Supiori	-
37	Papua	Waropen	-
38	Papua	Memberamo Raya	-
39	Papua	Asmat	-
40	Papua	Mappi	-
41	Papua	Boven Digoel	-
42	Papua	Nabire	-
43	Papua	Intan Jaya	-
44	Papua	Deiyai	-
45	Papua	Dogiyai	-
46	Papua	Paniai	-
47	Papua	Jayawijaya	-
48	Papua	Lanny Jaya	-
49	Papua	Yalimo	-
50	Papua	Yahukimo	-
51	Papua	Tolikara	-
52	Papua	Puncak	-
53	Papua	Puncak Jaya	-
54	Papua	Nduga	-
55	Papua Barat	Sorong	-
56	Papua Barat	Sorong Selatan	-

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KETERANGAN
57	Papua Barat	Maybrat	-
58	Papua Barat	Tambrau	-
59	Papua Barat	Manokwari Selatan	-
60	Papua Barat	Pegunungan Arfak	
61	Papua Barat	Teluk Bintuni	-
62	Papua Barat	Teluk Wondama	-

*Hanya berlaku untuk ASN yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten di atas.

3. Jadwal Pelaksanaan Program Beasiswa

Jadwal Seleksi Program Beasiswa Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Surat Penawaran Beasiswa Pusbindiklatren Tahap 2 Tahun 2024	Desember 2023
2	<i>Deadline Registrasi Online</i>	Januari 2024
3	Seleksi Nasional TPA dan TOEFL Tahap 2 Tahun 2024	Januari 2024
4	Seleksi Wawancara Tahap 2 Tahun 2024 (Jika Dibutuhkan)	Januari 2024
5	Pengumuman Karyasiswa Tahap 2 Tahun 2024	Februari 2024
6	Pelatihan Bahasa Inggris/ <i>English Academic for Purposes (EAP)</i>	Februari – Juli 2024
7	Surat Penawaran Beasiswa Pusbindiklatren Tahap 3 Tahun 2024 (Jika Dibutuhkan)	Januari 2024
8	Seleksi Nasional TPA dan TOEFL Tahap 3 Tahun 2024 (Jika Dibutuhkan)	Februari-Maret 2024
9	Pengumuman Karyasiswa Tahap 3 Tahun 2024	April 2024

4. Prosedur Pelamaran

- a. Mereka yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2;
- b. Peserta yang telah memenuhi persyaratan di atas, diharuskan mengisi formulir pendaftaran **secara online** dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung. Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi serta program beasiswa yang diminati;
- c. Peserta yang diprioritaskan adalah: a) Fungsional Perencana; b) Perencana di Instansi Perencanaan dan/atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Perencanaan; dan c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan;
- d. **Jika peserta mengalami kesulitan** dalam proses registrasi *online*, peserta diperkenankan menggunakan formulir manual yang terdapat dalam lampiran;
- e. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang **bermaterai, bertandatangan asli dan stempel cap basah** dengan persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung;
- f. Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) serta E-Meterai dapat digunakan dalam proses pendaftaran Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2024;
- g. Formulir pendaftaran harus disertai/dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
 - o Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2;
 - o Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
 - o Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
 - o Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi;
 - o Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan *Workshop* Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan;
 - o Khusus bagi para Pejabat Fungsional Perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisasi; serta
 - o Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai), sebagaimana format terlampir.

5. Komponen Biaya

Informasi terkait dengan biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas serta biaya yang ditanggung oleh instansi asal, mengacu kepada Buku Panduan Karyasiswa Tahun 2023 serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Bersama (*Cost Sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut:

a. Zonasi Tunjangan Biaya Hidup Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023

NO	KOTA	TUNJANGAN BIAVA HIDUP	TUNJANGAN BUKU	TOTAL TUNJANGAN BIAVA HIDUP	ZONASI
1	Padang	Rp.1.900.000	Rp.200.000	Rp.2.100.000	Zona 1
2	Aceh				
3	Palembang				
4	Yogyakarta				
5	Bandung	Rp.2.300.000	Rp.200.000	Rp.2.500.000	Zona 2
6	Makassar				
7	Malang				
8	Bogor				
9	Semarang				
10	Denpasar				
11	Surabaya	Rp.3.200.000	Rp.200.000	Rp.3.400.000	Zona 3
12	DKI Jakarta				
13	Depok				
14	Tangerang Selatan				

6. Sanksi

- a. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program studi secara sepihak, maka berdasarkan Surat Perjanjian, peserta **harus** mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa kepada kas

negara, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2021;

- b. Peserta akan **dikenakan sanksi** jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti pendidikan, Pusbindiklatren menemukan data yang tidak sesuai dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren (formulir pendaftaran) maupun dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren;
- c. Sanksi yang dimaksud pada *point* di atas dapat berupa:
 - Pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan
 - Pembatalan pemberian beasiswa dan penggantian biaya seleksi jika diketahui dalam proses penempatan
 - Pertimbangan kembali terhadap instansi dan/atau unit kerja terkait dalam proses penempatan karyasiswa di kemudian hari

7. Format Pernyataan Rencana Studi

Paragraf 1 : Latar Belakang Pendidikan sebelumnya, S1 untuk yang bermaksud mengambil program S2;

Paragraf 2 : Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;

Paragraf 3 : Alasan memilih bidang studi yang diinginkan serta dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;

Paragraf 4 : Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia

8. Panduan Registrasi Online

- a. Pendaftaran bagi peserta baru dan belum pernah sama sekali mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas
 - ✓ Silakan masuk ke Menu DAFTAR: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>
 - ✓ Masukkan NIP Anda lalu klik CEK
 - ✓ Apabila Anda belum terdaftar, lalu isikan: *User Name*, Nama Lengkap, Email, *Password*, *Re-Password* lalu klik DAFTAR.
 - ✓ Kemudian silahkan Anda cek di email untuk melihat notifikasi pemberitahuan aktivasi akun Anda.
 - ✓ Lalu klik link aktivasi, nanti akan diarahkan ke halaman lain.
 - ✓ Bila ada pertanyaan atau *Alert* klik OK
- b. Pendaftaran bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas
 - ✓ Untuk mendapatkan *username* dan *password* masuk ke Menu **Lupa Password**: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar/forgot.php>;

- ✓ Masukkan *email* yang sebelumnya pernah didaftarkan, jika nanti *email* Anda belum terdaftar di data Diklat Pusbindiklatren Bappenas, silakan Anda mengirim *email* ke Pusbindiklatren Bappenas dengan *email address*: pusbindiklatren@bappenas.go.id Perihal *up date email* Anda;
- ✓ Lalu klik KIRIM;
- ✓ Kemudian lihat *email* dan klik *link Forgot Password*;
- ✓ Jika terdapat peringatan/*Alert* klik OK;
- ✓ Silakan klik DIKLAT GELAR/DIKLAT NON GELAR;
- ✓ Lalu isikan formulir yang sudah tersedia;
- ✓ Setelah formulir diisikan semua lalu klik DAFTAR/UBAH;
- ✓ Untuk mendapatkan formulir yang sudah diisikan klik UNDUH

**HANYA DIGUNAKAN
JIKA KESULITAN
REGISTRASI ONLINE**

**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS
FORMULIR CALON PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA
(ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR.
HARUS DIISI DENGAN HURUF BALOK)**

-
1. Nama Lengkap (Sesuai Ijazah Terakhir) :
 2. NIP :
 3. Tempat, Tanggal Lahir :
 - Jenis Kelamin : L/P
 4. Alamat Rumah :
 - Kode Pos :
 - Kota/Kabupaten :
 - Provinsi :
 - Telepon/Handphone :
 5. Email Address :
 6. Instansi (Pemkot/Pemkab/Pemprov/KL) :
 7. Unit Kerja Eselon II/III :
 8. Alamat Kantor :
 - Kode Pos :
 - Kota/Kabupaten :
 - Provinsi :
 - Telepon/Handphone :
 - Email Instansi :
 9. Jabatan :
 - Golongan :
 10. Unit/Bagian Tempat Bekerja :
 - Apakah Unit Kerja Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
 - Apakah Pekerjaan Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
 11. Uraikan Secara Singkat Pekerjaan Saudara
:
 -
 -
 -
 - TMT PNS 100 % Golongan III/A pada S1 :
 - Masa Kerja sejak 100 % Golongan III/A :
 12. Pendidikan Terakhir : DIV/S1/S2
 - Perguruan Tinggi :

Fakultas (DIV/S1/S2) :
Jurusan :
Lulus Tahun (DIV/S1/S2) :
IPK : dari

13. Selain beasiswa Pusbindiklatren, apakah sedang mengikuti beasiswa di instansi lainnya? Ya/Tidak

14. Apakah Saudara termasuk dalam kategori Difabel/Disabilitas ? Ya/Tidak

15. Jika Saudara termasuk dalam kategori Difabel/Disabilitas, jelaskan perihal kondisi tersebut ?

16. Pilihan Rencana Studi S2 :

Tuliskan Urutan Prioritas Pilihan di dalam kurung yang tersedia :

(.....) Program S2 *Linkage* DXHR

1.
2.
3.
4.
5.

17. Tuliskan rencana studi pada program S2 prioritas pertama Saudara ke dalam esai maksimal 500 kata, yang terdiri dari (a) Latar belakang bidang studi Saudara; (b) Pengalaman kerja yang menerangkan tentang tugas pokok dan fungsi Saudara serta yang anda lakukan di instansi Saudara; (c) Alasan memilih program gelar prioritas pertama Saudara, serta; (d) Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia. **SILAKAN MENGGUNAKAN KERTAS TAMBAHAN JIKA DIPERLUKAN.**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

Menyetujui,

**(Kepala BKD/Kepala Biro SDM)
(TTD dan Cap Basah)**

(.....)

..... 2023

Yang Bersangkutan,

(Materai 10000 Rupiah)

(.....)

Catatan : Formulir dapat digandakan, dan yang diproses hanya yang bertanda tangan dan bermeterai asli. Harap melampirkan Surat Usulan, FC ijazah dan transkrip, serta SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

KOP SURAT
BKD/BIRO KEPEGAWAIAN/BIRO SDM
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANGAN SDM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini merangkan bahwa, pegawai atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Adalah ASN pada instansi tersebut di atas dan yang bersangkutan memilih program studi beasiswa Pusbindiklatren dengan urutan pilihan program studi sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

**TIDAK DIWAJIBKAN
MELENGKAPI KELIMA PILIHAN**

Pilihan-pilihan program studi tersebut sudah sesuai dengan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi peserta tersebut, sehingga diharapkan keikutsertaan pegawai tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan serta peningkatan kinerja instansi/institusi pegawai tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2023
Kepala BKD/Kepala Biro SDM,

(Materai 10.000, TTD dan Cap Basah)

(.....)
NIP

Tembusan:
Atasan langsung yang bersangkutan.